



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN, DAN  
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

NOMOR SOP	DSM / M / SOP / 02
TGL. PEMBUATAN	26 Maret 2021
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	1 April 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusbangkom JPW, 
NAMA SOP	I. Rezeki Peranginangin M.Sc., M.M. NIP. 196310171990031002
KUALIFIKASI PELAKSANA :	SOP Penanganan Sengketa
DASAR HUKUM :	Memahami Standar Operasional Prosedur/ Penanganan Sengketa Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PW
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	
3 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	
5 Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 21/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR	
6 Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 34/KPTS/KM/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
KETERANGAN :	PERALATAN PERLENGKAPAN :
1 SOP Penyusunan Laporan	Alat Tulis Kantor, Komputer/Printer/Scanner, Telepon
2 SOP Pembuatan Surat/Nota Dinas	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Disimpan sebagai data elektronik dan manual, kemudian diumumkan pada website Pusbangkom JPW	

Apabila Penyelenggaraan Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka akan menghambat proses penyelesaian kegiatan selanjutnya

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU (Menit/Hari)	OUTPUT	KET
		KIP	Pelaksana	PPID Pusbangkom JPW	PIC PPID/Biro Hukum	Saksi Ahli				
1	Menerima surat panggilan permohonan ajudikasi dari KIP beserta lampiran ritgkasan permohonan ajudikasi						Surat panggilan mediasi dan/ atau ajudikasi	60 Menit	a. Surat panggilan teregistrasi dalam buku registrasi Informasi b. Kronologis sengketa Informasi	
2	Memverifikasi kesesuaian surat panggilan dengan arsip catatan sidang mediasi						Surat panggilan dan berkas-kronologis sengketa Informasi	30 Menit	a. Surat panggilan b. Berkas-berkas sengketa Informasi	
3	Menyampaikan surat panggilan sidang mediasi beserta catatan sidang ke PPID						Surat panggilan dan berkas-berkas sengketa Informasi	180 Menit	a. Surat panggilan b. Berkas-berkas sengketa Informasi	
4	Berkonsultasi dengan PIC PPID dan Biro Hukum terkait permohonan ajudikasi						Surat panggilan dan berkas-berkas sengketa Informasi	2 hari	a. Surat panggilan b. Berkas-berkas sengketa Informasi c. Hasil Konsultasi dengan PIC PPID dan Biro Hukum	
5	Menyiapkan bukti-bukti terkait yang dibutuhkan dalam sidang ajudikasi						Berkas-berkas sengketa Informasi	2 Hari	a. Berkas-berkas sengketa Informasi b. Draft surat kuasa	
6	Menghndari sidang ajudikasi bersama PIC PPID dan Biro Hukum						Berkas-berkas sengketa Informasi dan surat kuasa	1 Hari	Berkas-berkas sengketa Informasi	
7	Mendengarkan pendapat pemohon informasi terkait regulasi yang relevan dan keberatan						Berkas-berkas sengketa Informasi dan surat kuasa	1 Hari	Kesepakatan mediasi/putusan ajudikasi	
8	Memberikan sanggahan atas apa yang disampaikan pemohon informasi dan menyampaikan alasan dan regulasi yang relevan mengapa Informasi tidak dibuka untuk publik, serta dikaitkan dengan tujuan dan mantaat apabila Informasi dibuka untuk publik						Berkas-berkas sengketa Informasi dan menyiapkan sanggahan dan bukti atas tanggapan sengketa Informasi	3 Hari	Kesepakatan mediasi/putusan ajudikasi	
9	Untuk memperkuat argumen, PPID Pusbangkom JPW dapat menghadirkan saksi ahli. Biaya yang ditanggung akibat menghadirkan saksi ahli ditanggung oleh pihak yang mengajukan						Berkas-berkas sengketa Informasi dan menghadirkan saksi ahli	3 Hari	Kesepakatan mediasi/putusan ajudikasi	
10	Mendengarkan putusan yang mengukuhkan putusan PPID Pusbangkom JPW untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian/seluruhnya						Laporan hasil penyelesaian sengketa Informasi	1 ahri	Laporan hasil penyelesaian sengketa Informasi	
11	Apabila salah satu pihak tidak setuju, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Kasasi						Laporan hasil penyelesaian sengketa Informasi, rekomendasi langkah selanjutnya, dan opini hukum terhadap hasil atau proses penyelesaian sengketa Informasi	2 Hari	Arisp dan/atau pernyataan keberatan terhadap hasil atau proses penyelesaian sengketa Informasi	